

BAB IV

KEBIJAKAN LOOK EAST SEBAGAI STRATEGI ROBERT MUGABE

Sejak terjadinya gejolak ekonomi dan politik yang buruk di Zimbabwe, Robert Mugabe sebagai presiden melakukan strategi khusus untuk bisa bertahan menghadapi krisis dan mencari sumber dana dari negara lain terkait sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yaitu dengan mengadopsi dan merumuskan kebijakan *Look East*. Bab ini berusaha menjelaskan dan memaparkan mengenai dasar-dasar diambilnya kebijakan *Look East* dan realisasi dari kebijakan *Look East* melalui kerjasama dengan negara-negara Timur, seperti Indonesia, India, Iran dan Cina.

A. Dasar diambilnya Kebijakan *Look East* di Zimbabwe

Fenomena yang menarik terjadi di benua Afrika saat memasuki abad ke-21 yang diwarnai dengan kehadiran negara-negara Asia Timur yang semakin intens dan terlihat giat beraspresiasi dalam rivalitas. Tak terkecuali juga dengan negara Zimbabwe yang ikut serta menarik negara-negara Asia Timur untuk bisa berinvestasi lebih di negaranya, mengingat diadopsinya kebijakan *Look East*. Adanya permasalahan yang kompleks di Zimbabwe, membuat Robert Mugabe sebagai orang yang paling berkuasa berinisiatif untuk menggunakan kebijakan tersebut untuk membantu perekonomian Zimbabwe yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi, akibat dijatuhkannya sanksi oleh negara-negara Barat. Tujuan negara-negara Barat memberikan sanksi terhadap Zimbabwe sendiri, agar Robert Mugabe sebagai pemimpin negara

menghentikan kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* (FTLRP) untuk dapat melindungi dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kulit putih yang tinggal di Zimbabwe agar tetap aman dan mendapatkan hak propertinya secara adil tanpa adanya tindak kekerasan (Youde, 2013). Namun, pemerintah Mugabe mengabaikannya dan tidak gemetar dalam menghadapi sanksi Barat tersebut. Alih-alih menganggapnya sebagai tanda perlunya reformasi ulang terhadap kebijakan *landreform* yang baru, Robert Mugabe dan ZANU-PF justru menafsirkan sanksi tersebut sebagai bukti bahwa negara-negara Barat berusaha untuk merekolonisasi Zimbabwe dan negara-negara berkembang (Fathiraini, 2015). Sanksi yang diberikan oleh Barat bukan merupakan alat untuk mempromosikan pemerintahan yang baik, tetapi lebih kepada strategi yang disengaja untuk melemahkan negara Zimbabwe, sehingga Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Kebijakan *Look East* Zimbabwe didasarkan pada keyakinan, bahwa lebih baik untuk menemukan kelompok sekutu baru yang akan terlibat dengan Zimbabwe tanpa khawatir tentang politik dalam negerinya, daripada mencoba menjilat dengan negara-negara yang berusaha hanya untuk melemahkan negara Zimbabwe. Presiden Mugabe pernah mengatakan, bahwa “Kami telah berbelok ke timur di mana matahari terbit, dan memberikan punggung kami di Barat tempat matahari terbenam (Mdlongwa, 2015). Kementerian Luar Negeri Zimbabwe sendiri sebenarnya tidak pernah merilis dokumen resmi yang menguraikan prinsip-prinsip kebijakan *Look East*, tetapi tekanan dasarnya jelas dalam pernyataan pemerintah dan pola perjalanan internasional para

pejabat Zimbabwe. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara kawasan Asia Timur, seperti Cina, Indonesia, Iran, dan India (Youde, 2013).

Kebijakan *Look East* yang diluncurkan pada tahun 2003 ini merupakan sebuah upaya dari Robert Mugabe sebagai Presiden untuk menghadapi sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Australia. Sanksi Barat yang didukung oleh partai oposisi *Movement Democratic Change* (MDC) telah memukul negara Zimbabwe dengan keras yang mengakibatkan kekurangan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku untuk manufaktur dan agroindustri di dalam negeri. Mugabe pun berusaha memanfaatkan kebangkitan kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur yang memiliki modal finansial dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menggantikan investasi Barat yang menyusut ke Zimbabwe. Kebijakan *Look East* ini memiliki tujuan agar Zimbabwe tidak ketergantungan dengan negara-negara Barat, terutama dalam hal ekonomi. Robert Mugabe mengatakan bahwa kebijakan pemerintahannya, yaitu "Lihat Timur" atau *Look East* adalah langkah yang efektif untuk melawan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat dan memberdayakan warga Zimbabwe sendiri. Kebijakan ini dianggap mampu memberdayakan masyarakat, jika dibandingkan dengan kebijakan Barat dalam mendanai proyek yang tidak memberdayakan masyarakat di tingkat lokal (Oxford Analytica, 2007).

Zimbabwe sendiri telah memperkuat hubungan ekonominya dengan beberapa negara Timur, seperti Cina, India, Indonesia, dan Iran. Mugabe

menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Zimbabwe akan segera pulih ketika kebijakan *Look East* mulai berbuah. Alasan mengapa perlu beberapa saat bagi ekonomi untuk pulih berutang banyak pada cara ekonomi Zimbabwe telah selaras dengan ekonomi Barat. Sejak Zimbabwe memulai kebijakan *Look East* telah ada banyak kegiatan sebagai pelaku bisnis dari negara-negara Asia, terutama dari negara Cina yang berusaha untuk berinvestasi di Zimbabwe dengan mencari kesepakatan yang menguntungkan di sektor listrik dan pertambangan, serta dalam bidang perdagangan. Mugabe mengatakan bahwa Zimbabwe belajar banyak dari negara-negara Timur, seperti Indonesia di mana negara tersebut telah menerapkan kebijakan Usaha Kecil dan Menengah yang disengaja yang mengarah pada pertumbuhan ekonominya.

Ada lima tujuan Zimbabwe menerapkan kebijakan *Look East*: (Youde, 2007).

- Dekolonisasi dan pembebasan Afrika; kedaulatan dan kesetaraan antar negara-negara di dunia,
- Pembangunan ekonomi di negara dunia ketiga,
- Memerangi Apartheid dan memanfaatkan sosialisme, sekaligus kapitalisme, dan
- Kedaulatan negara; prinsipnya, suatu negara tak boleh mencampuri urusan negara lain.

Embargo perjalanan dan pembekuan aset dapat membuat pejabat terkemuka di partai politik Front Persatuan Patriotik Nasional Zimbabwe

(ZANU-PF) Mugabe tidak mengunjungi Belanda atau melakukan bisnis di Amerika Serikat, tetapi itu bukan satu-satunya jalan untuk keterlibatan diplomatik di Dunia. Mugabe dan sekutunya telah menumbuhkan aliansi diplomatik alternatif dengan menghadirkan Zimbabwe sebagai korban neokolonialisme Barat dan eksploitasi ekonomi. Kepemimpinan telah mengembangkan jaringan dukungan yang memungkinkannya untuk terlibat dengan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Mugabe telah menawarkan pengalamannya sebagai kisah peringatan kepada sekutu-sekutunya: pengalaman Zimbabwe dengan Barat adalah simbol dari keinginan yang terakhir untuk mengkolonisasi seluruh dunia, dan Mugabe adalah benteng melawan eksploitasi semacam itu; karena itu, mendukung Zimbabwe sama dengan menolak eksploitasi dan neokolonialisme Barat. Pendekatan ini dimasukkan ke dalam tema kebijakan luar negeri umum Zimbabwe, yang menekankan pada pemberdayaan dan kedaulatan Afrika, sementara juga memberikan dorongan tambahan bagi negara-negara non-Barat untuk bersekutu dengan Zimbabwe. Digabungkan, berbagai elemen membentuk dasar dari kebijakan "Lihat Timur" Zimbabwe, yang telah digunakan untuk melawan label pariah dengan menciptakan tempat baru di mana untuk menggunakan pengaruh kebijakan luar negerinya. Melalui kebijakan Look East, Mugabe pada dasarnya memanfaatkan pusat-pusat kekuatan baru dalam komunitas global. Alih-alih terisolasi dan dijauhi, Zimbabwe telah menciptakan jalur diplomatik paralel yang sebagian besar mengabaikan tuntutan Barat (Youde, 2013).

B. Realisasi dari Kebijakan *Look East*

1. Hubungan Bilateral Zimbabwe-Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe telah dimulai sejak dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota Zimbabwe, Harare pada 14 Agustus 1986. Meskipun memang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Zimbabwe telah terjalin selama 29 tahun lamanya, Pemerintah Zimbabwe sendiri baru membuka kedutaannya di Indonesia pada bulan Oktober 2004. Hal tersebut baru dilakukan karena memang baru diterapkannya kebijakan *Look East* dalam politik luar negeri Zimbabwe akibat dari dampak dari adanya sanksi ekonomi yang berlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia.

Hubungan Zimbabwe dengan Indonesia semakin terjalin baik dikarenakan kedua negara ini memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai forum sub regional, regional dan internasional. Dukungan Zimbabwe terhadap Indonesia dalam forum internasional terlihat ketika pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008. Begitupun sebaliknya dengan dukungan Indonesia kepada Zimbabwe dalam Komite Tiga Sidang Umum ke-59 Majelis Umum PBB. Hubungan politik antara kedua negara terjalin dengan baik dengan adanya kerjasama dalam berbagai bidang dan adanya upaya saling dukung dalam berbagai fora internasional (Embassy of

the Republic of Indonesia in Harare, 2018). Selain kunjungan yang bersifat bilateral, Zimbabwe juga sering mengunjungi Indonesia untuk mengikuti forum internasional, seperti Gerakan Non Blok (GNB). Robert Mugabe sebelumnya pernah datang ke Indonesia pada tahun 1992 untuk menghadiri KTT Non-Blok ke 10. Kemudian, pada tanggal 23 Februari 2003, Robert Mugabe bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membahas revitalisasi GNB (HM Soeharto, 1991).

Dalam bidang perdagangan, Zimbabwe dan Indonesia sependapat bahwa volume perdagangan relatif lebih sedikit menguntungkan Zimbabwe. Produk perdagangan umumnya dikirim melalui pelabuhan Durban di Afrika Selatan atau pelabuhan Beira di Mozambik. Potensi produk Indonesia yang dapat memasuki pasaran Zimbabwe, yaitu kerajinan tangan, produk kulit, kertas, alat tulis kantor, peralatan medis, produk tekstil, barang elektronik, produk karet, plastik, mesin pengemasan, generator, kompor gas, bahan kimia, obat-obatan, barang pecah belah, alat-alat pertanian, alat tulis kantor dan suku cadang kendaraan bermotor (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Zimbabwe sendiri sangat mengharapkan pengusaha-pengusaha Indonesia mau menanamkan modal di negaranya. Terlihat pada tahun 2012, ekspor Zimbabwe ke negara Indonesia pernah mencapai \$46 juta. Hal inilah yang membuat Zimbabwe merasa ada potensi yang sangat besar yang dapat

dimanfaatkan dalam perdagangan antara Zimbabwe dan Indonesia (The Jakarta Post, 2014).

Berikut kerjasama yang dilakukan oleh Zimbabwe dan Indonesia dari tahun 2006- 2013:

- *Letter of Intent (LoI) between the State Ministry of Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe Concerning the Establishment of Women's Affairs Cooperation*, yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2006 di Harare Zimbabwe.
- *Memorandum of Understanding (MoU) between the State Ministry for Women Empowerment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development of the Republic of Zimbabwe concerning Women`s Affairs Cooperation*, yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2007 di Jakarta, Indonesia.
- MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) on Agriculture Co-operation, ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2011 di Bali
- MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan University of Zimbabwe, ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2012

- MoU mengenai kerjasama antara Institut Sepuluh November Surabaya dengan Harare Institute of Technology, ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2012

2. Hubungan Kerjasama Zimbabwe-India

Zimbabwe memiliki sejarah panjang mengenai hubungan akrab dan ramah dengan India. India juga pernah sangat mendukung perjuangan kemerdekaan di Zimbabwe. Zimbabwe pun tertarik pada investasi dengan India dalam bidang energi, kereta api, kesehatan dan sektor lainnya. Zimbabwe memandang India sebagai negara adikuasa yang baru muncul, yang dari pengalaman perkembangannya mereka banyak belajar, dan satu yang berpotensi memberikan batas kredit dan berinvestasi dalam pembangunan Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).

India mulai terlibat kerjasama dengan Zimbabwe dalam bidang perdagangan. Perdagangan antara dua negara tersebut bahkan pernah mencapai \$40 juta. Ekspor India ke Zimbabwe difokuskan pada tekstil, obat-obatan dan obat-obatan, mesin dan peralatan transportasi dan telekomunikasi dan informasi. India juga membuka jalur kredit ke negara-negara Afrika, termasuk Zimbabwe yang menjadi penerima manfaat utama. Selain investasi, India telah berusaha untuk bekerja sama dengan Zimbabwe atas dasar kemanusiaan. Selama kekeringan parah pada tahun 2003, India menyumbang 50.000 ton beras ke Zimbabwe. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya negara tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial baik (Nyemba, Zungura, &

Mhandara, 2013). India memberikan bantuan 50.000 ton beras pada tahun 2003 ketika Zimbabwe mengalami kekeringan hebat. Bantuan serupa lainnya dari 500 ton beras diberikan pada 23 Maret 2015. India memberikan \$5 juta untuk mempromosikan UKM (Pusat Teknologi India-Zimbabwe) di Zimbabwe, sebuah proyek yang diresmikan oleh Presiden Robert Mugabe pada 4 Agustus 2008 (Embassy of India, 2019).

Kunjungan menteri dari Zimbabwe ke India telah berlangsung secara rutin sejak tahun 2006, dimulai dengan kunjungan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh H.E. Obert Mpfu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional India untuk Pertemuan Tingkat Menteri *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA) di New Delhi pada 5-6 Oktober 2006 dan melakukan sidang tertutup tentang Kemitraan Proyek India-Afrika pada 9-11 Oktober 2006. Selain itu, pada bulan April 2008, Zimbabwe telah menyerahkan rancangan *Air Services Agreement* atau Perjanjian Layanan Udara antara Zimbabwe dan India. Kedua belah pihak pun akhirnya menyetujui rancangan tersebut dan *Air Services Agreement* sudah siap untuk ditandatangani. *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Sains dan Teknologi juga telah disampaikan kepada Pemerintah Zimbabwe (Mea.Gov, 2013).

Perdagangan antara Zimbabwe dan India pun mengalami dampak yang luar biasa. Berikut tabel peningkatan perdagangan antara Zimbabwe-India pada tahun 2002-2012:

Table 4.1 Perdagangan Bilateral Zimbabwe-India

Tahun	Ekspor ke Zimbabwe (dalam jutaan \$US)	Impor dari Zimbabwe (dalam jutaan \$US)
2002	15.83	14.04
2003	23.51	16.42
2004	23.45	27.15
2005	23.99	25.55
2006	31.90	32.18
2007	31.91	22.24
2008	58.99	13.77
2009	48.70	21.87
2010	113.95	11.56
2011	171.72	6.89
2012	147.65	1.71

Sumber: <https://www.researchgate.net/pub>

3. Hubungan Kerjasama Zimbabwe-Iran

Selama akhir tahun 2000-an, Robert Mugabe memprakarsai inisiatif diplomatik yang dikenal sebagai kebijakan *Look East*. Dia

berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia dan Timur Tengah, termasuk Iran (Reuters, 2009). Zimbabwe dan Iran telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik bilateralnya. Pada tahun 2005, kedua negara tersebut menandatangani beberapa perjanjian kerja sama yang mencakup ikatan politik dan hubungan ekonomi di bidang teknologi dan infrastruktur (Farrar-Wellman, 2010). Penguatan hubungan ekonomi antara Harare dan Teheran berlanjut sampai tahun 2006, ketika Robert Mugabe kembali ke Iran dan menandatangani enam perjanjian dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Perjanjian-perjanjian ini mengklarifikasi kerja sama tingkat tinggi antara kedua negara di bidang pertanian, industri minyak, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan (Xinhua, Zimbabwe president back home from fruitful visit to Iran:report, 2006). Zimbabwe dan Iran juga mengkonfirmasi niat mereka untuk meningkatkan kerja sama di sektor swasta mereka dan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara (Xinhua, 2006).

Kurangnya sumber energi domestik dan kemampuan penyulingan minyak memiliki efek besar pada kebijakan ekonomi Zimbabwe pada tahun 2000-an. Karena kekurangan mata uang asing, Zimbabwe tidak dapat mengimpor bahan-bahan yang penting untuk mempertahankan pasokan bahan bakar yang stabil di tahun 2006. Pada tahun tersebut, Iran berjanji untuk mengirim teknisi bahan bakar ke Zimbabwe untuk menyelidiki kemungkinan pembenahan satu-satunya kilang minyak negara itu, yaitu sebuah fasilitas yang awalnya dibangun untuk memurnikan

minyak mentah Iran. Menteri Energi Zimbabwe, Mike Nyambuya, mengatakan Iran membuat sejumlah proposal untuk memenuhi kebutuhan Zimbabwe dalam bahan bakar dan produk minyak (Payvand, 2006).

Selain kerjasama dalam hal militer dan ekonomi, kepentingan budaya dan bantuan kemanusiaan terdiri dari komponen penting dari hubungan Zimbabwe-Iran. Pada bulan November 2006, Mugabe dan Ahmadinejad mengeluarkan sebuah komunike bersama yang ditandatangani setelah pertemuan Komisi Gabungan Kelima di mana kedua negara menekankan tujuan mereka untuk memperluas kerja sama politik, ekonomi, dan budaya dan mengembangkan posisi terpadu mengenai masalah-masalah kepentingan bersama (Xinhua, 2006). Kemudian pada tahun yang sama, Mugabe juga berpartisipasi dalam pembicaraan dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad di Teheran, Iran. Mugabe menjanjikan dukungannya untuk Iran dan mengecam intervensi Barat dalam urusan Iran, dengan mengatakan bahwa "Negara-negara Non Blok harus melakukan perlawanan untuk menghadapi orang-orang jahat ini dan sistem jahat mereka," kata Mugabe. "Negara-negara yang berpikiran sama harus berkumpul dan menyusun mekanisme untuk membela diri kita sendiri" (Fox News, 2006).

Pada bulan September 2007, Mugabe bertemu dengan Presiden Ahmadinejad di luar Majelis Umum PBB untuk membahas pendapat bersama mereka bahwa negara-negara berkembang bersatu melawan "dominasi Barat" dan neokolonialisme Amerika Serikat dan Inggris.

Presiden Iran menyatakan penghargaan atas partisipasi Zimbabwe dalam sesi menteri Gerakan Non-Blok tentang hak asasi manusia yang diadakan di Teheran pada tahun yang sama (VOA, 2007). Zimbabwe dan Iran datang bersama akhir minggu itu untuk mengumumkan "koalisi perdamaian" kolaboratif mereka tentang rezim dari Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Presiden Mugabe dan Ahmadinejad membahas gagasan itu diperlukan untuk memunculkan koalisi perdamaian sebagai tanggapan terhadap agresi pengganggu global (AFP, 2007). Pada Desember 2007, Iran membuka perpustakaan di pusat kebudayaannya di Harare sebagai isyarat kerjasama budaya. Duta Besar Iran untuk Zimbabwe, Rasoul Momeni memuji pembukaan perpustakaan, "Saya berharap pertukaran budaya antara kedua negara akan dikonsolidasikan lebih lanjut dan keduanya akan mengatasi kesulitan mereka di bawah naungan kerja sama mereka. Kami juga ingin menarik perhatian pembaca yang tertarik terhadap buku-buku tentang budaya dan adat istiadat Iran untuk membiasakan rakyat Zimbabwe dan melalui ini membangun jembatan di jalan peningkatan hubungan antara kedua negara" (Fars News Agency, 2007).

Zimbabwe dan Iran juga menandatangani perjanjian usaha patungan untuk memproduksi traktor di negara Afrika pada Maret 2008. Menurut perjanjian itu, perusahaan penanaman modal asing Iran akan mengendalikan 55% dari usaha itu. Sedangkan, Perusahaan Pengembangan Industri Zimbabwe mempertahankan keseimbangan.

Target produksi adalah 5.000 traktor per tahun dengan harapan bahwa produk tersebut akan berkembang ke pasar regional di tahun-tahun mendatang. Komponen akan diimpor dari Iran dan kemudian digantikan oleh komponen domestik Zimbabwe. Iran menginvestasikan \$4 juta dalam kesepakatan itu (Ligne, 2008). Memasuki tahun 2009 di bawah bobot kehancuran ekonomi hampir total dan sanksi ekonomi. Presiden Mugabe mencari bantuan ekonomi dari beberapa negara, termasuk Iran. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk merenovasi kilang minyak Zimbabwe dan menawarkan pasokan bahan bakar jangka panjang dengan imbalan memberikan hak penambangan eksklusif mineral strategis di negara Afrika (Mushekwe, 2009). Selain itu, Zimbabwe mengizinkan Iran untuk membangun pembangkit listrik gas di dalam perbatasannya.

Pada Januari 2010, Mohammad Assadi, Kepala Pusat Kebudayaan Kedutaan Besar Iran di Zimbabwe, menyatakan keprihatinan Iran atas sanksi yang dijatuhkan pada Zimbabwe oleh Inggris dan sekutunya (New Zimbabwe, 2009). Pada bulan yang sama, wakil duta besar Iran untuk Zimbabwe, Javad Dehghan, mengumumkan niat Republik Islam tersebut untuk menawarkan bantuan kemanusiaan ke Zimbabwe. Iran menyumbangkan penghambat makanan yang terdiri dari minyak goreng, makanan dan garam, dan uang tunai untuk mengamankan 250 kg benih jagung untuk proyek *Zunde Ramambo* di bawah pimpinan Mashayamombe sebagai bagian dari upayanya untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Zimbabwe juga menerima bantuan

dari Iran dalam mekanisasi sektor pertanian, memperbarui peralatan *Zimbabwe Broadcasting Holdings*, dan saat ini sedang mendiskusikan kemitraan dalam pariwisata dan sektor ekonomi lainnya (The Herald, 2010).

Pada Januari 2010, Iran mengumumkan niatnya untuk menawarkan bantuan kemanusiaan ke Zimbabwe untuk menunjukkan komitmen Teheran untuk memperluas wilayah kerja sama. Wakil duta besar Iran untuk Zimbabwe, Javad Dehghan menetapkan bahwa Iran akan menyediakan 80 kursi roda, 25 kotak tablet pelengkap vitamin, peralatan bersalin, dan makanan ke sembilan klinik untuk warga Zimbabwe yang cacat. Kedutaan Iran juga menyumbangkan dana untuk *Proyek Zunde Ramambo* milik Kepala Mashayamombe untuk pembelian 250 kilogram benih jagung. Proyek ini merupakan bagian dari upaya memberi makan orang miskin. Dehghan menyatakan bahwa upaya kemanusiaan berkontribusi pada, "Memperkuat hubungan persaudaraan antara negara-negara kita, kami juga telah memberikan sumbangan kepada beberapa konstituensi di Zimbabwe dan sumbangan ini hari ini adalah demonstrasi lebih lanjut dari solidaritas antara negara-negara kita" (Xinhua, 2010).

4. Hubungan Bilateral antara Zimbabwe-Cina

Jejak kedekatan hubungan antara Zimbabwe dengan Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Hubungan bilateral Zimbabwe-Cina telah berkembang selama bertahun-tahun yang meliputi sektor-sektor ekonomi dan politik yang diprioritaskan untuk mendukung

pembangunan negara. Namun, pada tahun 2000-an hubungan antar kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Terutama saat kebijakan *Look East* diterapkan oleh Robert Mugabe, yang menjadi tanda komitmen kedua negara untuk saling mendukung (Ojakorotu & Kamidza, 2018). Kunjungan kenegaraan pun sering dilakukan oleh kedua negara. Hubungan Zimbabwe dan Cina memiliki setidaknya tiga pilar, yaitu hubungan strategis dan diplomatik, hubungan ekonomi, dan hubungan sosial dan budaya. Hubungan Zimbabwe-Cina hanya fokus pada dukungan politik, tidak campur tangan dalam urusan negaradan penjualan senjata (Chun, 2014). Salah satu alasan kuat mengapa Zimbabwe lebih tertarik dengan negara Cina, karena Cina menganut prinsip "bisnis adalah bisnis". Cina tidak suka ikut campur dengan urusan politik negara lain. Hal tersebut merupakan satu hal yang sangat diharapkan oleh Zimbabwe. Sikap Cina ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang meminta syarat-syarat, seperti demokrasi dan penegakan HAM sebelum memberikan bantuan (Debora, 2017). Selain itu menurut Zimbabwe, Cina merupakan negara yang dikenal memiliki pengaruh besar di Asia.

Realisasi kebijakan *Look East* dengan negara Cina berjalan dengan adanya *Forum on China Africa Cooperation* (FOCAC). Forum ini telah memperkuat perdagangan dan investasi bilateral antara Zimbabwe dan Cina. Zimbabwe memanfaatkan FOCAC ini agar Cina semakin bisa terlibat dalam industri pertanian, pertambangan, konstruksi dan pariwisata Zimbabwe. Selain itu, Zimbabwe juga ingin menarik pengusaha Cina

untuk masuk di industri ritel Zimbabwe (F. Tombindo, 2016). Sejak dimulainya KTT FOCAC pertama, hubungan perdagangan antara Zimbabwe dan Cina telah meningkat sebanyak \$106 miliar sampai pada tahun 2008 (Gutu, 2009). Bantuan dari Cina ini bersifat *unconditional aid* untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi di Zimbabwe melalui kerangka kerja *Strategic Partnership* yang bisa menggantikan peranan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia) bagi Zimbabwe (Harrington, 2003).

Zimbabwe pun berhasil membuat Cina untuk lebih banyak melakukan impor dari negara Zimbabwe dibandingkan ekspor. Pada tahun 2002, ekspor utama Zimbabwe pada waktu itu adalah tembakau, yang menyumbang lebih dari 90% mengalir ke negara Cina. Ekspor utama pada waktu itu adalah tembakau, yang menyumbang lebih dari 90 % ekspor ke Cina. Selain itu, Zimbabwe juga mendapatkan sumbangan makanan dan bantuan tunai dari Cina untuk membeli makanan akibat melemahnya kondisi perekonomian Zimbabwe. Zimbabwe juga mendapat dukungan dalam pembangunan fasilitas olahraga, rumah sakit dan sekolah, dan investasi perusahaan-perusahaan Cina termasuk pabrik-pabrik tekstil dan semen. Perusahaan-perusahaan milik negara, seperti *China Aero-technology Import and Export Corporation* (CATIC) juga telah melakukan perjanjian investasi dengan perusahaan Zimbabwe, *ZESA Holdings*, untuk perbaikan pembangkit listrik. CATIC juga akan berinvestasi US \$400 juta dalam penambangan Zimbabwe pada tahun 2005. Cina telah berkontribusi

pada pengembangan manufaktur baja di Zimbabwe melalui keterlibatan keuangannya dalam perbaikan blast furnace di *Zimbabwe Iron and Steel Company* (ZISCO). Cina juga telah memberikan pinjaman tanpa bunga dan hibah kepada Zimbabwe untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur sejak ekonomi Zimbabwe mengalami krisis yang hebat akibat dampak dari sanksi negara-negara Barat. (Valy, 2008)

Dalam pemerintahan Robert Mugabe pada saat itu, Zimbabwe kerap membeli perlengkapan militer, seperti pesawat, persenjataan, radar pertahanan udara, dan peralatan medis dari Beijing, Cina. Cina juga rutin mengirim penasehat militer ke angkatan bersenjata Zimbabwe. Pemerintah Zimbabwe pun mengirim perwira untuk melakukan pelatihan di Cina (Harrington, 2003). Penjualan persenjataan ke Zimbabwe ini terjadi setelah adanya sanksi dari negara-negara Barat. Pembelian senjata ini menunjukkan keinginan Mugabe untuk menjaga pasukan keamanan negara agar tetap di sisinya (Oxford Analytica, 2007). Cina menghabiskan \$100 juta untuk membangun sebuah akademi militer profesional di Zimbabwe, *Harare's National Defence College* pada tahun 2012. Perguruan tinggi tersebut dirancang untuk memperbaiki sistem intelijen, keamanan dan pertahanan (Chingono H. , 2013).